

UJIAN AKHIR SEMESTER

NAMA: MUHAMMAD SHADAM BASTIAN

NIM: 11221042

1. Salah satu contoh permasalahan keadilan di Indonesia adalah penanganan kasus korupsi. Meskipun Indonesia memiliki berbagai lembaga dan perangkat hukum untuk memberantas korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penegakan hukum terkait korupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya kasus-kasus di mana pelaku korupsi, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh politik, mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan bebas dari jerat hukum.

Ada beberapa tantangan dalam penegakan hukum terutama bagi pelaku korupsi, antara lain:

- a. Intervensi Politik: Sering kali, proses hukum terganggu oleh intervensi politik. Pejabat yang memiliki koneksi politik kuat bisa saja mendapatkan perlakuan istimewa.
- b. Kelemahan Institusi Hukum: Ada kelemahan dalam institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, baik dalam hal integritas maupun kapabilitas.
- c. Korupsi di Lembaga Hukum: Ironisnya, korupsi juga sering ditemukan di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri, yang memperparah masalah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
- d. Kurangnya Pengawasan dan Transparansi: Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam proses penegakan hukum membuat sulit untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan adil dan benar.

Namun, adapun solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah:

- a. Penguatan KPK: Memberikan wewenang dan dukungan yang lebih besar kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ini bisa dilakukan dengan revisi undang-undang yang memperkuat posisi dan fungsi KPK.
- b. Reformasi Lembaga Hukum: Melakukan reformasi di tubuh lembaga penegak hukum, termasuk peningkatan gaji dan kesejahteraan, serta peningkatan kapabilitas mereka.
- c. Penegakan Hukum yang Transparan: Melakukan penegakan hukum yang lebih transparan dalam penanganan kasus hukum, terdapat proses dan hasil sidang secara terbuka sehingga masyarakat bisa memantau.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Sipil: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan media dalam mengawasi dan melaporkan kasus-kasus korupsi, serta memberikan perlindungan kepada whistleblowers.
- e. Pendidikan Antikorupsi: Mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah dan kampanye publik untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini.



2. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, berdasarkan ide nasional yang diambil dari nilai-nilai budaya dan lingkungan strategis, dengan tujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsep ini menekankan pentingnya integrasi dan kesatuan wilayah serta keragaman budaya dalam satu kesatuan bangsa dan negara yang utuh.

Menggali potensi untuk mendukung kesatuan wilayah dan persatuan bangsa, menurut saya:

Dari sudut pandang ekonomi: (1) Mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berbasis maritim seperti perikanan, pariwisata bahari, dan industri maritim. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi antar wilayah. (2) Meningkatkan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah dengan memberikan akses permodalan, pelatihan, dan fasilitas pemasaran. Ini akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Dari sudut pandang politik: (1) Melanjutkan dan memperkuat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki kekuasaan dan sumber daya yang cukup untuk mengelola potensi dan kebutuhan lokalnya. Ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Dari sudut pandang budaya: (1) Melindungi dan melestarikan situs-situs bersejarah, tradisi, dan kesenian lokal sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Ini tidak hanya akan memperkuat identitas budaya tetapi juga menarik pariwisata yang dapat meningkatkan ekonomi lokal.

Dari sudut pandang historis: (1) Memperingati dan merayakan hari-hari besar nasional secara inklusif, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Ini akan memperkuat solidaritas nasional dan rasa persatuan.

3. Pandangan saya terkait dinamika penghitungan suara, perlu adanya transparansi dalam proses penghitungan suara sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. KPU harus memastikan bahwa seluruh tahapan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh semua pihak, termasuk saksi dari partai politik, pengawas independen, dan media massa

Sebagai bagian dari civitas akademika, solusi yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut; Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses pemilu, termasuk tahap rekapitulasi penghitungan suara, melalui kampanye edukasi. Civitas akademika dapat mengadakan seminar, diskusi publik, dan publikasi ilmiah yang menjelaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam pemilu.

4. Sikap saya dalam mempertahankan nilai ketahanan nasional dan bela negara, (1) Saya aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan komunitas di lingkungan tempat tinggal saya. Contohnya, ketika diadakannya kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar atau pembangunan infrastruktur di lingkungan yang biasa diadakan setiap sabtu dan minggu. (2) Saya juga terlibat dalam kegiatan amal dan bantuan sosial, seperti membantu keluarga kurang mampu di lingkungan saya dengan memberikan bantuan sembako yang biasanya akan diberikan ketika diadakannya hari besar di lingkungan saya.